

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu fondasi utama perekonomian Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, usaha mikro diartikan sebagai usaha produktif milik orang perorangan dengan modal usaha paling banyak Rp1 miliar atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2 miliar. Sektor ini menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional dan berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia., 2023). Besarnya kontribusi ini menjadikan pengembangan UMKM, khususnya usaha mikro, sebagai isu strategis yang perlu ditangani secara terarah di tingkat daerah.

Kota Bandung sebagai salah satu kota metropolitan di Jawa Barat memiliki ekosistem UMKM yang cukup dinamis. Kota ini terdiri atas 30 kecamatan dengan karakteristik kependudukan, kepadatan usaha, dan struktur ekonomi yang berbeda-beda, sehingga potensi pengembangan usaha mikro antar wilayah pun tidak merata. Sebagai wujud komitmen terhadap pengembangan usaha mikro secara merata di seluruh wilayah, Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) telah mencanangkan program pengembangan usaha mikro lintas kecamatan yang bukan sekadar wacana, melainkan telah tercantum secara resmi dalam Rencana Kerja (Renja) Diskop UKM Kota Bandung Tahun 2026 sebagai bagian dari Rencana Aksi Program Prioritas Kepala Daerah (Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung., 2026). Dua poin aksi yang tercantum secara eksplisit dalam dokumen tersebut adalah: (1) mendirikan inkubasi bisnis di 30 kecamatan, dan (2) pembentukan UMKM Center di 30 kecamatan.

Pelaksanaan program berskala kota tersebut pada kenyataannya dihadapkan pada keterbatasan sumber daya yang signifikan. Berdasarkan dokumen yang sama,

pagu anggaran Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung Tahun 2026 sesuai Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tercatat sebesar Rp34.221.807.441, sementara hasil analisis kebutuhan riil Dinas mencapai Rp88.625.148.697. Terdapat selisih sebesar Rp54.403.341.256 yang harus diajukan melalui permohonan tambahan anggaran terpisah, termasuk untuk pembangunan sarana UMKM Center yang pada tahap awal baru menjangkau 5 dari 30 kecamatan (Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung., 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi program pengembangan usaha mikro secara serentak di seluruh 30 kecamatan menghadapi kendala nyata dari sisi anggaran, sehingga penentuan wilayah prioritas menjadi kebutuhan strategis, bukan sekadar pilihan administratif.

Permasalahannya, keterbatasan anggaran tersebut tidak diimbangi dengan adanya mekanisme penentuan prioritas wilayah yang terukur dan berbasis data. Dokumen Renja Diskop UKM Kota Bandung Tahun 2026 memang mencantumkan target 30 kecamatan secara menyeluruh, namun belum menjelaskan dasar pertimbangan kuantitatif mengenai kecamatan mana yang seharusnya didahulukan ketika anggaran tidak mencukupi untuk mencakup seluruh wilayah sekaligus. Di sisi akademis, kombinasi *entropy weighting* dan TOPSIS telah terbukti efektif digunakan untuk menentukan prioritas wilayah kecamatan, seperti pada penelitian Pangesti *et al.* (2025) yang menentukan daerah prioritas pembangunan di Jawa Tengah. Penelitian tersebut menunjukkan relevansi metodologis kombinasi *entropy weighting* dan TOPSIS untuk konteks kewilayahan, namun berfokus pada pembangunan daerah secara umum, bukan pada pengembangan usaha mikro. Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik menggabungkan metode *entropy weighting* dan TOPSIS untuk menentukan prioritas kecamatan dalam konteks pengembangan usaha mikro lintas sektor, khususnya di Kota Bandung. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini.

Menjawab kebutuhan tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung telah menyediakan data statistik yang cukup lengkap hingga tingkat kecamatan, mencakup data kepadatan penduduk, jumlah usaha mikro, dan jumlah kepala keluarga. Ketersediaan data ini membuka peluang bagi penentuan prioritas wilayah

untuk dilakukan secara terukur dan berbasis data, alih-alih hanya mengandalkan pertimbangan administratif semata. Untuk mengolah data multikriteria tersebut menjadi peringkat wilayah, diperlukan metode pengambilan keputusan yang mampu mempertimbangkan beberapa kriteria secara bersamaan dan menghasilkan urutan prioritas yang objektif.

Dari berbagai metode MCDM yang tersedia, seperti *Analytical Hierarchy Process* (AHP), *Additive Ratio Assessment* (ARAS), dan *Weighted Aggregated Sum Product Assessment* (WASPAS), penelitian ini memilih *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) dengan pertimbangan tertentu. AHP, misalnya, mengandalkan perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) yang bersumber dari penilaian subjektif pakar, sehingga rentan terhadap bias personal dan kurang sesuai untuk konteks penelitian ini yang menuntut objektivitas penuh berbasis data sekunder. TOPSIS dipilih karena mampu menentukan alternatif terbaik berdasarkan jarak terpendek dari solusi ideal positif dan jarak terjauh dari solusi ideal negatif, sehingga menghasilkan peringkat yang mudah diinterpretasikan sekaligus dapat dipadukan dengan metode pembobotan objektif seperti *entropy weighting*. Relevansi metode TOPSIS dalam konteks penentuan prioritas wilayah telah dibuktikan pada beberapa penelitian terdahulu. Febrian & Irawan (2026) menerapkan kombinasi AHP dan TOPSIS untuk menentukan prioritas pembangunan wilayah, sementara Prabandari *et al.* (2021) menggunakan TOPSIS untuk menyusun skala prioritas pengembangan potensi wilayah pada level kecamatan di Kabupaten Malang. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa TOPSIS merupakan metode yang tepat digunakan dalam pengambilan keputusan berbasis banyak kriteria untuk konteks kewilayahan, sehingga relevan diterapkan pada penelitian ini, khususnya ketika dipadukan dengan pembobotan objektif untuk meminimalkan unsur subjektivitas yang umum ditemukan pada penelitian sejenis.

Penelitian ini menggunakan empat kriteria penilaian, yaitu kepadatan penduduk, jumlah usaha mikro eksisting, jumlah kepala keluarga, dan rasio pasar per kompetitor yang merupakan turunan dari pembagian jumlah kepala keluarga dengan jumlah usaha mikro di tiap kecamatan. Keempat kriteria ini dipilih karena secara bersama-sama dapat menggambarkan potensi pasar sekaligus tingkat

kejenuhan persaingan di suatu wilayah, sejalan dengan sifat program UMKM Center yang bersifat lintas sektor sehingga kriteria yang digunakan pun perlu bersifat umum dan berlaku merata untuk berbagai jenis usaha mikro, bukan spesifik pada satu sektor tertentu. Dengan menggabungkan keempat kriteria tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan peringkat kecamatan yang tidak hanya mempertimbangkan besarnya potensi pasar, tetapi juga tingkat persaingan usaha yang ada di dalamnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menentukan bobot kriteria secara objektif menggunakan metode *entropy weighting* dan melakukan perangkingan 30 kecamatan di Kota Bandung menggunakan metode TOPSIS, sehingga dapat diidentifikasi kecamatan-kecamatan yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program pengembangan usaha mikro. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kuantitatif bagi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung dalam menetapkan prioritas wilayah, khususnya di tengah keterbatasan anggaran yang telah diuraikan sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bobot kriteria yang objektif untuk menilai potensi pengembangan usaha mikro di 30 kecamatan Kota Bandung dapat ditentukan menggunakan metode *entropy weighting* berbasis data Badan Pusat Statistik Kota Bandung?
2. Bagaimana hasil perangkingan 30 kecamatan di Kota Bandung berdasarkan potensi pengembangan usaha mikro menggunakan metode TOPSIS?
3. Kecamatan mana yang menjadi prioritas utama untuk pelaksanaan program pengembangan usaha mikro di Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menentukan bobot kriteria secara objektif menggunakan metode *entropy weighting* berbasis data BPS Kota Bandung.

2. Melakukan perangkingan 30 kecamatan di Kota Bandung menggunakan metode TOPSIS berdasarkan empat kriteria yang telah ditentukan.
3. Mengidentifikasi kecamatan prioritas yang paling potensial untuk pelaksanaan program pengembangan usaha mikro di Kota Bandung.

1.4 Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus dan kedalaman penelitian, batasan masalah ditetapkan sebagai berikut:

1. Unit analisis penelitian ini adalah kecamatan, tidak sampai pada level kelurahan atau individu pelaku usaha.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder resmi BPS Kota Bandung, mencakup data kepadatan penduduk, jumlah usaha mikro, dan jumlah kepala keluarga per kecamatan. Pendekatan penelitian ini bersifat sepenuhnya berbasis data (*data-driven*) untuk menjaga objektivitas metode *entropy weighting* yang diterapkan.
3. Jenis usaha yang menjadi fokus penelitian adalah usaha mikro lintas sektor, sesuai klasifikasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yaitu usaha dengan modal paling banyak Rp1 miliar atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2 miliar, tanpa dibatasi pada satu jenis sektor usaha tertentu.
4. Kriteria analisis terbatas pada empat kriteria, yaitu C1 Kepadatan Penduduk (*benefit*), C2 Jumlah Usaha Mikro (*cost*), C3 Jumlah Kepala Keluarga (*benefit*), dan C4 Rasio Pasar per Kompetitor (*benefit*).
5. Metode analisis terbatas pada TOPSIS dengan penggunaan bobot objektif melalui pengukuran entropi yang didasarkan pada data BPS, tanpa melibatkan teknik pembobotan subyektif seperti AHP.
6. Output penelitian ini terbatas pada perangkingan 30 kecamatan berdasarkan nilai preferensi TOPSIS (C_i) beserta rekomendasi kecamatan prioritas. Penelitian ini tidak mencakup implementasi kebijakan, pendampingan langsung pelaku usaha, maupun pengembangan sistem informasi berbasis hasil perangkingan.

7. Proses konfirmasi awal kepada pelaku usaha mikro (sub-bab 3.5.2) dilakukan kepada tiga informan dan bersifat eksploratif untuk memperkuat justifikasi kriteria; hasil ini tidak dimaksudkan untuk generalisasi statistik maupun sebagai dasar validasi hasil perangkingan TOPSIS.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis: Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan penerapan metode MCDM, khususnya kombinasi *entropy weighting* dan TOPSIS, dalam konteks perencanaan pengembangan usaha berbasis data publik di Indonesia. Penelitian ini juga memberikan kebaruan berupa penggunaan kriteria rasio pasar per kompetitor sebagai variabel turunan yang belum banyak digunakan pada penelitian sejenis.

Manfaat praktis: Bagi pelaku usaha mikro, hasil perangkingan kecamatan dapat menjadi referensi awal dalam menentukan lokasi usaha yang potensial. Bagi Diskop UKM Kota Bandung, penelitian ini menghasilkan output berupa tabel perangkingan 30 kecamatan disertai rekomendasi kecamatan prioritas, yang dapat menjadi masukan kuantitatif dalam menetapkan prioritas wilayah untuk pelaksanaan program pengembangan usaha mikro yang telah dicanangkan, seperti pembentukan UMKM Center dan inkubasi bisnis di 30 kecamatan.

1.6 Posisi Penelitian

Berikut adalah perbandingan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Perbandingan Penelitian Sebelumnya (*State of the Art*).

Tabel 1. 1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya (*State of the Art*)

No	Peneliti, (Tahun)	Judul Penelitian	Metode	Objek Penelitian	Perbandingan yang dijadikan alasan tinjauan penelitian
1.	Nurfaizah <i>et al.</i> (2024)	Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Lokasi Usaha Bisnis di	TOPSIS	Lokasi usaha bisnis retail di Kabupaten Pangkep.	Penelitian ini menggunakan TOPSIS untuk penentuan lokasi usaha retail, dijadikan acuan

No	Peneliti, (Tahun)	Judul Penelitian	Metode	Objek Penelitian	Perbandingan yang dijadikan alasan tinjauan penelitian
		Kabupaten Pangkep Menggunakan Metode TOPSIS			penerapan metode yang sama dalam konteks UMKM perkotaan
2.	Adhiarta, Witanti, Sabrina (2021)	Pemilihan Lokasi Awal Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dengan Metode <i>Analytical Hierarchy Process</i>	AHP	UMKM di Kabupaten Bandung Barat	Objek penelitian serupa (lokasi UMKM) namun menggunakan metode AHP. Menjadi pembanding untuk menunjukkan keunggulan TOPSIS dalam penanganan kriteria multi- dimensi tanpa prosedur perbandingan berpasangan
3.	Heriyani <i>et al.</i> (2024)	SPK Menggunakan Pendekatan ARAS pada Penentuan Lokasi Usaha UMKM	ARAS	Lokasi usaha UMKM	Metode berbeda (ARAS) namun objek sama. Menjadi pembanding metodologis dalam keluarga MCDM untuk menilai kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan
4.	Darmawan <i>et al.</i> (2021)	Penerapan Metode TOPSIS dalam SPK untuk Kota yang Menerapkan PSBB	TOPSIS	Perangkingan wilayah/kota di Indonesia	Menunjukkan penerapan TOPSIS untuk perangkingan wilayah administratif berbasis data sekunder. Relevan secara metodologis dengan penelitian

No	Peneliti, (Tahun)	Judul Penelitian	Metode	Objek Penelitian	Perbandingan yang dijadikan alasan tinjauan penelitian
					ini yang juga merangking satuan administratif
5.	Oprasto, R. R. (2023)	Penerapan Metode Topsis dalam Pemilihan Lokasi Usaha Strategis	TOPSIS	Lokasi usaha umum	Metode menggunakan TOPSIS untuk lokasi usaha, namun hanya mengevaluasi satu unit usaha tanpa pembobotan objektif dan tidak mencakup skala kecamatan
6.	Rahayu & Nada (2022)	Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Bidang UMKM Paling Diminati Menggunakan Metode TOPSIS	TOPSIS	UMKM bidang usaha	Konteks UMKM sama, namun fokusnya pada penentuan bidang usaha, bukan lokasi. Menjadi acuan efektivitas TOPSIS dalam keputusan multikriteria UMKM
7.	Utama & Ikhwan (2025)	Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan AHP-TOPSIS Untuk Alokasi Sumber Daya Penanganan Multi-Bencana BPBD	AHP-TOPSIS	9 kecamatan bencana, Deli Serdang	Sama-sama merangking kecamatan dengan TOPSIS, namun pembobotan menggunakan AHP (subjektif/expert). Penelitian ini lebih objektif karena menggunakan entropy weighting berbasis data
8.	Elyana <i>et al.</i> (2026)	Penentuan Wilayah	Entropy-WASPAS	Wilayah produksi padi	Pendekatan <i>Entropy</i> +

No	Peneliti, (Tahun)	Judul Penelitian	Metode	Objek Penelitian	Perbandingan yang dijadikan alasan tinjauan penelitian
		Produksi Padi Terbaik Menggunakan Metode Entropy dan WASPAS			MCDM untuk perangkingan wilayah berbasis BPS identik secara metodologis. Perbedaan pada metode perangkingan (WASPAS vs TOPSIS) dan domain (pertanian vs UMKM)
9.	Simanjuntak <i>et al.</i> (2023)	Penerapan Metode AHP dalam Penentuan Prioritas Pembangunan Jembatan Rangka di Kabupaten Deli Serang	AHP- TOPSIS	Infrastruktur wilayah	Penggunaan MCDM untuk prioritas wilayah administratif. Berbeda pada objek (infrastruktur) dan pembobotan subjektif AHP vs entropy weighting pada penelitian ini
10.	Isyriyah <i>et al.</i> (2024)	Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Lokasi Usaha Kuliner Menggunakan Metode AHP dan TOPSIS	AHP- TOPSIS	Lokasi usaha kuliner di Malang	Menggunakan metode <i>hybrid</i> AHP-TOPSIS untuk pemilihan lokasi usaha, relevan secara metodologis. Perbedaannya terletak pada pembobotan: AHP bersifat subjektif berbasis <i>pairwise</i> <i>comparison</i> , sedangkan penelitian ini menggunakan <i>entropy weighting</i>

No	Peneliti, (Tahun)	Judul Penelitian	Metode	Objek Penelitian	Perbandingan yang dijadikan alasan tinjauan penelitian
					yang objektif berbasis data BPS
11.	Febrian & Irawan (2026)	Implementasi AHP dan TOPSIS untuk Menentukan Prioritas Pembangunan Wilayah	AHP- TOPSIS	Pembangunan wilayah	Menggunakan TOPSIS untuk prioritas wilayah, memvalidasi relevansi metode. Perbedaan: penelitian ini pakai TOPSIS murni dengan entropy weighting (objektif), bukan hybrid AHP (subjektif)
12.	Prabandari <i>et al.</i> (2021)	Penentuan Skala Prioritas Pengembangan Potensi Mata Air untuk Irigasi di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dengan Menggunakan Metode TOPSIS	TOPSIS	Sumber daya air, level kecamatan	Struktur penelitian mirip (unit analisis kecamatan, prioritas pengembangan wilayah), namun domain berbeda (irigasi vs usaha mikro)
13.	Penulis (2026)	Penentuan Prioritas Kecamatan untuk Pengembangan Usaha Mikro di Kota Bandung Menggunakan Metode TOPSIS	TOPSIS- Entropy	30 Kecamatan di Kota Bandung	Kebaruan: penggunaan kriteria rasio pasar per kompetitor sebagai variabel turunan yang belum digunakan penelitian sejenis, cakupan 30 kecamatan Kota Bandung secara lintas sektor selaras dengan program prioritas

No	Peneliti, (Tahun)	Judul Penelitian	Metode	Objek Penelitian	Perbandingan yang dijadikan alasan tinjauan penelitian
					UMKM Center Pekot Bandung, dan pembobotan objektif <i>entropy weighting</i> berbasis data BPS

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama, penggunaan kriteria rasio pasar per kompetitor sebagai variabel turunan yang belum banyak digunakan dalam penelitian sejenis. Kedua, cakupan analisis yang mencakup seluruh 30 kecamatan di Kota Bandung secara lintas sektor usaha mikro, selaras dengan skala program prioritas Pemerintah Kota Bandung yang juga menyasar 30 kecamatan sekaligus, yaitu pembentukan UMKM Center dan inkubasi bisnis. Ketiga, penggunaan pembobotan objektif melalui metode *entropy weighting* berbasis data resmi BPS Kota Bandung, tanpa melibatkan penilaian subjektif pakar sebagaimana pada metode AHP. Berbeda dengan C1-C3 yang merupakan data langsung dari BPS, kriteria C4 pada poin pertama merupakan variabel turunan yang dikonstruksi khusus dalam penelitian ini, dengan dasar konseptual mengacu pada Hidayat *et al.* (2025) mengenai tingkat persaingan dan aksesibilitas pasar.

1.7 Sistematika Penulisan

Menjelaskan secara ringkas isi dari tiap bab untuk membantu pembaca memahami alur dokumen.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang dilakukannya penelitian, perumusan masalah yang menjadi fokus utama, tujuan yang ingin dicapai, batasan ruang lingkup penelitian, serta manfaat yang diharapkan baik dari sisi akademis maupun praktis. Selain itu, bab ini juga memuat posisi penelitian terhadap studi-studi terdahulu untuk menunjukkan kontribusi atau kebaruan penelitian. Di akhir bab, dijelaskan sistematika penulisan laporan secara keseluruhan agar pembaca memahami alur pembahasan yang akan disampaikan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan teori-teori dan konsep-konsep ilmiah yang relevan dan mendukung penelitian. Tinjauan pustaka meliputi definisi, prinsip, model, atau pendekatan yang digunakan dalam menganalisis permasalahan. Di dalamnya juga dapat dimasukkan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan pembentukan kerangka pemikiran (kerangka teoritis) untuk membantu memetakan arah analisis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode dan langkah-langkah yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Di dalamnya dijelaskan bahan dan peralatan yang digunakan, lokasi dan waktu pelaksanaan, prosedur pelaksanaan penelitian, teknik pengumpulan serta metode analisis data. Selain itu, dijelaskan pula jadwal kegiatan dalam bentuk tabel atau diagram agar alur kegiatan penelitian dapat diketahui secara kronologis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan temuan yang diperoleh selama penelitian secara objektif dalam subbab Hasil, berupa data, tabel, gambar, atau grafik tanpa interpretasi, yang disusun sesuai dengan metode yang telah dijelaskan pada Bab III. Selanjutnya, pada subbab Pembahasan, temuan tersebut diinterpretasikan secara ilmiah dengan menjelaskan makna dan penyebabnya, dikaitkan dengan tujuan penelitian pada Bab I serta dibandingkan dengan teori dan penelitian terdahulu pada Bab II, termasuk pengungkapan keterbatasan penelitian yang ditemukan selama proses penelitian berlangsung.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan jawaban akhir atas rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan pada Bab I, berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV, dalam subbab Kesimpulan. Selanjutnya, pada subbab Saran, disampaikan rekomendasi yang konkret dan dapat ditindaklanjuti, baik untuk pengembangan penelitian selanjutnya secara akademis maupun untuk penerapan praktis bagi pihak-pihak terkait, yang didasarkan pada keterbatasan penelitian yang telah diungkapkan sebelumnya.